MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 322 /DJMT/KP7.1/XI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka menerapkan standar layanan publik yang prima pada peradilan di satuan kerja Lingkungan Peradilan Militer maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi layanan peradilan secara berkala dan berkesinambungan menerapkan standar layanan publik yang prima pada peradilan di satuan kerja Lingkungan Peradilan Militer.

Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 131/DjMT/KEP/OT.1.3/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A/ 513166, MARSEKAL PERTAMA TNI (Marsma TNI), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
2. Kolonel Laut (H) Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H./ 13004/P, Kolonel (Kolonel), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganisminmil;
3. Mayor Chk K.G Raegen, SH/ 11070053480285, Mayor (Mayor), Hakim Yustisial;
4. Happy Rahmawati, S.E., M.M./ 198604132009122004, Penata Tk. I (III/d), Kasi Tata Kelola Ditbinganisminmil;
5. Arianie Amanda, S.E./ 198108292009122002, Penata Tk. I (III/d), Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganisminmil.

Untuk : Melaksanakan tugas untuk Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer bertempat di Dilmiltama Jakarta pada tanggal 27 sd. 28 November 2023;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023

Plt. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Bambang Myanto